

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian maka diambil kesimpulan bahwa:

1. Sistem pengelolaan tambak *Silvofishery* di Desa Tanjung Rejo adalah sistem pengelolaan tambak tradisional yang mampu menekan biaya produksi petambak seperti penggunaan pupuk, pembelian bibit, serta pembuatan konstruksi tambak yang lebih ekonomis dan yang terpenting adalah ramah terhadap lingkungan. Walaupun demikian, masih banyak petambak yang belum menerapkan sistem pengelolaan tambak ini, padahal untuk hasil produksi ikan seperti Ikan Nila, Bandeng, Ikan Mujair serta Kepiting tidak memiliki perbedaan jauh untuk hasil produksinya. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Perikanan dan Instansi terkait membuat pengetahuan petambak terhadap penerapan sistem pengelolaan tambak *silvofishery* menjadi kurang optimal.

Penerapan sistem pengelolaan tambak *Silvofishery* merupakan suatu cara penerapan pembangunan berwawasan lingkungan sebab pembangunan acapkali menjadi pemicu pencemaran dan perusakan lingkungan.

2. Sistem pengelolaan tambak *non silvofishery* di Desa Tanjung Rejo adalah sistem pengelolaan tambak semi intensif yakni teknik pengelolaan tambak yang lebih modern dimana petambak di Desa Tanjung Rejo harus

mengeluarkan biaya produksi lebih besar dimulai dari pembuatan konstruksi tambak yang lebih banyak membutuhkan biaya, pembelian pupuk dan pengadaan bibit yang unggul. Petambak Di Desa Tanjung Rejo dominan lebih menerapkan sistem pengelolaan tambak *Non Silvofishery* hal tersebut dapat terlihat dari perbandingan jumlah sampel antara petambak yang menggunakan sistem pengelolaan tambak *silvofishery* dan *non silvofishery* yaitu 13 : 29.

3. Hasil Produksi tambak *silvofishery* dan *Non Silvofishery* tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hasil produksi tambak dengan sistem pengelolaan tambak *non silvofishery* memang memiliki hasil produksi yang lebih banyak jika dibandingkan dengan sistem pengelolaan tambak *non silvofishery* baik jenis ikan Nila, Ikan Bandeng, Ikan Mujair dan Udang Teger hanya saja jika ditinjau kembali dari biaya produksi tentu berbanding lurus. Selain biaya produksi yang lebih tinggi, sistem pengelolaan tambak *Non Silvofishery* lebih terkesan tidak memperhatikan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

B. Saran

1. Kepada Dinas Perikanan dan Instansi terkait hendaknya mensosialisasikan kembali sistem pengelolaan tambak *silvofishery* yang lebih menguntungkan baik dalam hal pengurangan biaya produksi yang harus dikeluarkan petambak, maupun dampak positif yang ditimbulkan terhadap

lingkungan kawasan pesisir mengingat pembangunan yang berwawasan lingkungan sangat dibutuhkan ditengah – tengah pengerusakan dan pencemaran yang telah banyak dilakukan oleh pembangunan itu sendiri.

2. Kepada para petambak baik petambak yang menggunakan sistem pengelolaan tambak *silvofishery* dan *non silvofishery* dalam menjalankan atau mengelola tambak harus selalu mengikuti penyuluhan, pencerahan dari dinas perikanan setempat agar dapat meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan tambak sehingga dikemudian hari hasil produksi tambak dapat meningkat.

3. Kepada petambak yang menggunakan sistem pengelolaan tambak Non Silvofishery hendaknya dapat mempertimbangkan sistem pengeloaan tambak yang akan digunakan sehingga petambak dapat memperoleh keuntungan yang lebih optimal.